

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga lahir pada tanggal 18 Desember 1030 atau hari Sabtu Legi tanggal 3 Rajab tahun 1246 Hijriyah. Kabupaten Purbalingga yang terletak di Karsidenan Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan, serta berada di antara beberapa rangkaian pegunungan dan aliran sungai. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan Gunung Slamet, Dataran Tinggi Dieng dan bagian selatan merupakan depresi aliran Sungai Serayu. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa, 15 Kelurahan, 886 Dusun, 1.530 RW dan 4.968 RT dengan jumlah penduduknya sebanyak 894.062 jiwa yang terbagi atas 441.706 jiwa penduduk laki-laki atau 49,40% dan 452.062 penduduk perempuan atau 50,60%.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good Governance) di Indonesia. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Purbalingga.
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Purbalingga terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga



B. KONDISI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang secara operasional telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menata ulang kelembagaan perangkat daerah yang ada

menyesuaikan peraturan perundang-undangan dimaksud. Bentuk dari tindak lanjut tersebut diterbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga
4. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga
5. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan responsive terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, setelah berjalan satu tahun, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan evaluasi terhadap kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ada dengan menggabungkan beberapa fungsi baik dalam skala satuan organisasi maupun skala sub organisasi. Dari hasil kajian evaluasi ini diterbitkan :

1. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga
4. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga.

Untuk membentuk postur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif (*rightsizing*) mengikuti perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, pada tahun 2012 dilakukan evaluasi terhadap beberapa SKPD yaitu :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Dikembangkan dari 4 (empat) bidang menjadi 5 (lima) bidang seiring penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, melalui penerbitan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Kantor Lingkungan Hidup

Dalam rangka efektifitas dan merespon dinamika kehidupan masyarakat, diperlukan adanya peningkatan kapasitas Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, yang dilegalisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. UPTD Panti Nugroho

Peningkatan kapasitas dari UPTD menjadi Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah (RSKBD) Panti Nugroho melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana tersebut di atas, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
3. Dinas Daerah :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Dinas Perhubungan dan kominfo
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - h. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
 - i. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
 - j. Dinas Peternakan dan Perikanan
 - k. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

4. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain :

- a. Inspektorat
- b. BKD
- c. Bappeda
- d. BKBPP
- e. BPPKP
- f. Bapermasdes
- g. Badan Lingkungan Hidup
- h. RSUD
- i. RSKBD
- j. Set/Lakhar BPBD
- k. KPMPT
- l. Kesbangpol
- m. Satpol PP
- n. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

5. Kecamatan (18 Kecamatan);

6. Kelurahan (15 Kelurahan).

C. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang dan landasan hukum penyusunan pelaporan kinerja, gambaran umum Kabupaten Purbalingga serta pengantar lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2010–2015 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

A. Rencana Strategis

Menyajikan secara singkat mengenai rencana strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) Tahun 2010–2015 yang meliputi visi

misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program serta kegiatan yang direncanakan.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan target-target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis sudah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2015.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dan singkat tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.
2. Daftar Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.